

Akta pernyataan notaris dan pengesahan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang : analisa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 02 Desember 2010 = Notary deed and endorsement original copy of the letter made by notary not in accordance with the provisions of the act : analysis of the Council Decision Investigator Notary's Center Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010 dated 2nd of December 2010

Raden Roro Cantik Dwita Kartika, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364934&lokasi=lokal>

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUN dan Kode Etik Notaris. Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dalam putusan tersebut Notaris menerbitkan Akta Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak mewakili suatu Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam pembuatan akta oleh Notaris, yang dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otensitasnya. Pembuatan akta tersebut oleh Notaris juga merupakan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara 6 (enam) bulan kepada notaris.

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan tersebut dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum dan Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administrasi, karena jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut maka para pihak tersebut dapat mengajukan gugatan.

<hr><i>Notary is a public official, who have the authority discretion to make an authentic act. A Limited Liability Company to be able to perform legal acts should be represented by a board of directors or persons authorized for it under Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT).

In carrying out the department's authority, a Notary has the obligation and the prohibition set forth in the Code of Conduct UUN and Notary. However, in practice it often happens that such violations do good Notary intentional or not intentional. As with any violation committed by a Notary that is reflected in the verdict Assembly Center Notary Surety date 02 December 2010 ID : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 that a notary releasing the deed signed by the parties represent a Limited Company but does not indicate the basis of the actions as directors as specified in the Articles of Incorporation or Limited Liability Company based on the letter from the board of directors to represent Company Limited. It is a violation of the act by a Notary

manufacturing, which could cause a loss of its status as an act. Manufactured by notary act is also a violation of the code and of the notary. Therefore the Assembly of Notary Surety gives administrative sanction in the form of a temporary cessation of 6 (six) months to the notary.

In this thesis using normative juridical research methods with an emphasis on the use of secondary data. From the analysis it is known that the violations committed in the manufacture of notary act such as statement could cause an act to be null and void and the Notary may be subject to civil and administrative sanctions, because if there are parties who feel aggrieved by the issuance of the act then the party may file a class action lawsuit.